

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 2016.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Cetakan VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi 3), Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efi laila kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan”, 2001.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003.
- Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi, Transparency International Indonesia (The Coalition Against Corruption)*, Jakarta, 2003.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Alumni, 2015.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta, 2016.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2008.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yopi Gunawan Kristian, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15 Tahun 2006.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

C. Jurnal, Artikel

A.A. Anggy Tryeza Purnama Ningrum, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2021.

Andi Muhammad Sodyan, Amiruddin, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2, No. 1.

Emerson Yuntho, dkk, "Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi", *Policy Paper Indonesian Corruption Watch*, 2014.

Fazzan azzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.14 No.2, 2015.

Ismansyah, "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Demokrasi* (ejournal.unp.ac.id), Vol. 6, No. 2.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.

Nashriana, "Asset Recovry dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Kajian Syari'ah*, Vol 10 (2), 2010.

Nashriana, "Asset Recovry dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Kajian Syari'ah*, Vol 10 (2), 2010.

Nila Amania, "Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Syariati*, Vol. II No. 02, November 2016.

Rixy Fredo S "Suatu kajian tentang kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)", *Lex Crimen*, Vol IV No.5 (Juli, 2015).

Sultan, "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", Skripsi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar: UNHAS, 2016.

D. Internet

Ani Mardatila, "BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ini Tugasnya", terdapat disitus <https://www.merdeka.com/sumut/bpkp-adalah-badan-pengawasan-keuangan-dan-pembangunan-ini-tugasnya-kln.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018, terdapat disitus <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan->

Chairul Umam, “Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kerap Hambat Penuntasan Korupsi”, terdapat disitus <https://rri.co.id/nasional/hukum/1300789/perhitungan-kerugian-negara-kerap-hambat-penuntasan-korupsi>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada tanggal 10 Oktober November 2021.

